

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan langkah yang mengarah pada perbaikan atau peningkatan layanan pembelajaran bagi peserta didik. Dengan menjadikan sekolah sebagai sebuah lembaga yang terus berkembang kearah yang lebih baik adalah salah satu contoh wujud upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah karena didorong oleh banyak faktor.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong upaya peningkatan mutu sekolah ini, pertama, adalah faktor fungsi sekolah, yaitu sebagai lembaga pendidikan formal yang melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Mengingat pentingnya peran ini, sewajarnya upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah menjadi prioritas utama yang selalu diupayakan oleh pemerintah termasuk maupun masyarakat.

Kedua, faktor lain yang juga mendorong upaya peningkatan mutu pendidikan adalah adanya kebutuhan dari masyarakat yang menginginkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas tapi juga dapat memberikan pendidikan yang lebih baik bagi putra putri mereka. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu membantu putra putri mereka untuk lulus dengan nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah yang baik sehingga dapat melanjutkan atau diterima di sekolah favorit atau mudah mendapat pekerjaan setelah lulus dari sekolah tersebut.

Ketiga, faktor persaingan dari masing-masing sekolah dalam menarik minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Seiring dengan banyaknya sekolah-sekolah di berbagai jenjang Pendidikan yang terus tumbuh di

masyarakat terutama yang dikembangkan oleh individu maupun oleh lembaga non pemerintah menjadikan persaingan antar lembaga pendidikan tersebut semakin tinggi terutama dalam menarik minat masyarakat agar memilih lembaga pendidikan mereka bukan yang lain. Sebagai dampak dari persaingan antar lembaga pendidikan ini, sekolah-sekolah tersebut berlomba-lomba menawarkan berbagai keunggulan yang dimilikinya, yang salah satunya adalah menawarkan kualitas dan keunggulannya, serta biaya pendidikan. Dimana persaingan ini muncul ketika sekolah-sekolah membuka tawaran dan mampu memberi jaminan mutu, baik negeri maupun swasta, pilihan masyarakat pun semakin banyak. Kesadaran masyarakat untuk membayar jasa pendidikan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar yang harus dikeluarkan, tetapi seberapa baik mutu produk atau jasa yang dibeli untuk dibandingkan dengan sekolah lain (Danim, 2003).

Dari tiga faktor tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu terus dilakukan, mengingat bahwa mutu adalah salah satu faktor penarik minat sekaligus menjadi nilai jual dan keunggulan satuan pendidikan dalam bersaing dengan satuan pendidikan yang lain. Lebih lanjut, ketika kepercayaan masyarakat terhadap kebermutuan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut telah terbentuk, masyarakat tidak mempermasalahkan lagi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat bersekolah di satuan pendidikan tersebut.

Namun, seiring dengan arus globalisasi yang terus mempengaruhi kehidupan, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan termasuk minat masyarakat dalam memilih satuan pendidikan juga berubah dan berkembang. Di era sekarang ini, mutu pendidikan bukanlah satu-satunya yang menjadi daya tarik dan kebutuhan masyarakat. Selain mutu masyarakat juga membutuhkan adanya keunggulan pendidikan yang ditawarkan sekolah, baik keunggulan dalam bidang akademik maupun non akademik yang menurut masyarakat menjadi nilai lebih yang dimiliki sekolah dibanding yang sekolah yang lain, keunggulan dalam bidang tertentu inilah yang yang menjadi daya tarik atau alasan utama masyarakat memilih satuan pendidikan tersebut.

Sama seperti mutu yang harus diupayakan untuk terus ditingkatkan oleh sekolah, keunggulan dalam bidang akademik atau non akademik yang ditawarkan sekolah juga harus diupayakan untuk dilakukan karena dapat dikatakan bahwa keunggulan yang dimiliki atau ditawarkan oleh satuan pendidikan menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat sekaligus menjadi pembeda dengan satuan pendidikan yang lain. Ada tiga alasan lain yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, yaitu: (1) keunggulan sekolah dalam penanaman nilai (agama atau moral), (2) status sosial, dan (3) cita-cita. Pentingnya keunggulan ini perlu diupayakan oleh sekolah terutama dalam menghadapi persaingan global dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Sholeh, 2005) Keunggulan lain selain keunggulan dari kualitas pendidikan, yang dimiliki satuan pendidikan seperti penanaman nilai-nilai (agama atau moral) dalam pembentukan karakter, kebanggaan masyarakat sebagai peserta didik di suatu lembaga pendidikan tertentu, dan kesesuaian keahlian yang ditawarkan dengan cita-cita yang ingin diraih, juga harus terus diupayakan oleh setiap satuan pendidikan terutama untuk dapat bersaing dalam menarik minat masyarakat untuk bersekolah di satuan pendidikan tersebut, sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat global yang menginginkan pendidikan yang tidak hanya berkualitas tapi juga memiliki keunggulan yang berdaya saing serta menanamkan karakter bagi peserta didiknya. Hanya dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang tinggilah jati diri bangsa menjadi kokoh, kolaborasi dan daya saing bangsa meningkat sehingga mampu menjawab berbagai tantangan abad 21. Untuk itu, pendidikan nasional harus berfokus pada penguatan karakter di samping pembentukan kompetensi peserta didik.

Pendidikan merupakan bagian dari perkembangan serta perubahan masyarakat itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu cara sistematis dalam mengupayakan manusia agar mampu bertahan hidup serta beradaptasi dengan kondisi dan situasi saat ini. Pendidikan tidak hanya berupa kurikulum yang terdiri dari berbagai mata pelajaran karena pada hakikatnya mata pelajaran merupakan bidang ilmu yang diadopsi dari berbagai bidang kehidupan. Tantangan pendidikan saat ini dihadapkan pada era globalisasi dengan tidak menghilangkan karakteristik Indonesia sebagai jati

diri bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lainnya. Pendidikan dapat mencapai pembelajaran bermakna dengan menguatkan prinsip berpikir dan berwawasan global dengan tindakan yang berdasarkan kearifan lokal (Utari, Degeng, dan Akbar, 2016). Proses globalisasi sudah tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat, proses globalisasi sudah ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan perdagangan bebas yang sudah ditandatangani oleh sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia di dalamnya.

Globalisasi teknologi komunikasi dan informasi sudah dimulai sejak adanya teknologi canggih yang mampu menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia tanpa berhadapan secara langsung akan tetapi mampu berkomunikasi serta bertatap muka melalui jaringan internet. Masyarakat Indonesia tidak dapat menolak kehadiran globalisasi serta dampak yang ditimbulkannya di berbagai aspek/bidang kehidupan. Tantangan tersebut merupakan suatu sebab yang mendasari perubahan kurikulum dalam pendidikan, akan tetapi pemerintah pusat lupa bahwa setiap daerah memiliki cara/budaya tersendiri dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan zaman yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal daerah. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna sebagai pelestarian tradisi dan nilai-nilai yang bermakna untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan budaya yang ada (Permana, Nasution, dan Gunawijaya, 2011).

Kearifan akan lestari jika diajarkan melalui pola terstruktur, sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat. Dan peran tersebut dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal seperti sekolah.

Sekolah dipandang sebagai tempat terbaik saat ini dalam menanamkan dan mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Keberadaan sekolah saat ini, tidak hanya berperan sebagai tempat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Lebih dari itu, sekolah merupakan tempat yang mengajarkan nilai-nilai kearifan dalam konteks berbangsa, bernegara, dan beragama yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Jati diri suatu bangsa bergantung pada upaya

pelestarian nilai-nilai yang dijunjung dan dilekatkan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Upaya mengembalikan fungsi sekolah sebagai tempat dikembangkannya karakter bangsa berbudaya yang dirasa sudah mulai luntur akibat arus globalisasi dan perkembangan era, telah diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang ditetapkan untuk memperkuat pendidikan karakter di tingkat sekolah.

Penguatan pendidikan karakter bukanlah suatu kebijakan yang baru karena sejak Tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Satuan pendidikan menjadi sarana strategis dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki sistem, infrastruktur, dan dukungan ekosistem pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari perkotaan sampai pedesaan.

Penguatan karakter bangsa telah menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen inilah yang kemudian ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengamalkan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan karakter (PENDIDIKAN KARAKTER) secara bertahap mulai tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) telah menegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) juga terpapar secara tersurat berbagai kompetensi yang bersangkutan dengan karakter di samping intelektualitas. Hal ini menandakan

bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dapat dikatakan sudah berada pada jalur yang tepat, karena telah memberikan pendidikan karakter sekaligus membentuk intelektualitas berupa kompetensi. Namun demikian, proporsi penerapan pendidikan karakter dengan pendidikan intelektual belum berimbang akibat berbagai faktor.

Usaha penyeimbangan pendidikan karakter dengan pembentukan kompetensi senantiasa harus dilakukan. Demi kepentingan masa depan bangsa Indonesia, bahkan sejak sekarang perlu dilakukan pemusatan (*centering*) pendidikan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Kesadaran sekaligus usaha pemusatan pendidikan karakter di jantung pendidikan nasional semakin kuat ketika pada Tahun 2010 pemerintah Indonesia mencanangkan sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan karakter Bangsa. Hal tersebut perlu dilanjutkan, dioptimalkan, diperdalam, dan bahkan diperluas sehingga diperlukan penguatan pendidikan karakter bangsa. Untuk itu, sejak sekarang perlu dilaksanakan Gerakan Penguatan Pendidikan karakter (PENDIDIKAN KARAKTER) dengan mengindahkan asas keberlanjutan dan kesinambungan.

Undang-undang telah dengan jelas menguraikan bahwa pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berbudaya. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap cinta terhadap budaya sendiri. Sehingga sekolah yang merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan, memiliki peranan penting dalam proses pelestarian budaya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sudarwan Danin (2008) yang menyatakan bahwa fungsi penyandaran atau disebut juga fungsi konservatif bermakna bahwa sekolah bertanggung jawab untuk memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia.

Kebijakan pendidikan karakter secara yuridis dan teknis telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) no 87 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digagas pemerintah bentuk implementasinya dalam dunia pendidikan ialah melalui Gerakan Penguatan Pendidikan karakter (Pendidikan Karakter). Adapun tujuan dari program Penguatan Pendidikan karakter ialah : pertama membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Tahun 2045 yang memiliki jiwa pancasila dengan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; *kedua*, mengembangkan platform pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan melibatkan public melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal serta memperhatikan keragaman budaya Indonesia; dan ketiga, melakukan revitalisasi dan memperkokoh potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan keluarga dalam mengimplementasikan Pendidikan karakter.

Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa yang memiliki mental pemenang. Karakter juga memiliki fungsi sebagai penggerak dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Pentingnya fondasi moral serta spiritual kehidupan bangsa diperlukan pada kondisi negara saat ini. Hal itu tidak datang sendirinya, namun harus dibangun dan dibentuk untuk menjadikan suatu bangsa bermartabat. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Tujuan yang diharapkan dalam pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal (3) yang isinya adalah:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dunia pendidikan diharapkan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter sehingga anggota masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan norma-norma di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan manusia masa yang akan datang. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat serta akan membentuk karakter yang kuat pula.

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan yang memiliki budi pekerti (karakter) dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 yang memposisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dasar pelaksanaan pendidikan karakter mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Operasional pendidikan karakter perlu adanya rujukan kebijakan nasional, sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 fungsi dan tujuan pendidikan yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

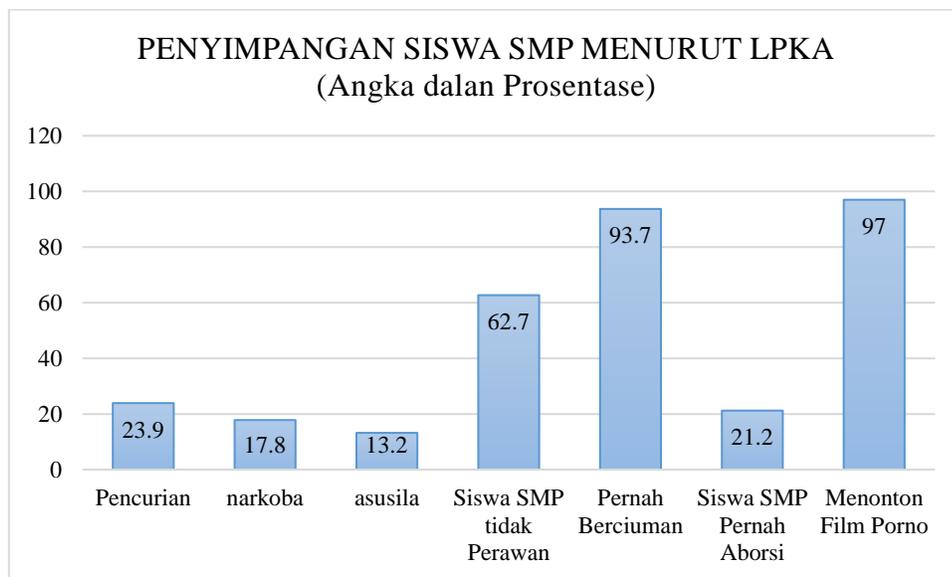
Karakter secara koheren terdiri atas hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Semua hal tersebut dimiliki oleh setiap manusia, dan dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan pendidikan yang dilaluinya semasa manusia tersebut hidup.

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti; disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.

Budimansyah (2012, hlm.6) menjelaskan bahwa olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Olah pikir berkaitan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Adapun olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat dan menarik. Sedangkan olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian dan kreativitas.

Dengan demikian, terdapat 4 (empat) karakter utama dari seorang individu yakni jujur, cerdas, tangguh dan peduli yang keempatnya diperoleh dari berbagai hasil baik itu hasil olah hati, olah pikir, olah raga serta olah rasa dan karsa. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan secara teoritis saja, akan tetapi juga lebih kepada implementasi dari pengetahuan yang diajarkan.

Implementasi pendidikan karakter belum dapat terimplementasi secara maksimal hal ini terlihat dari kasus mengenai pendidikan karakter di Indonesia masih banyak terjadi. Berdasarkan riset KPAI telah menangani 1885 kasus pada semester pertama pada tahun 2019. Terdapat 504 anak jadi pelaku pidana, dari mulai pelaku narkoba, mencuri, hingga kasus asusila menjadi kasus yang paling banyak (Sumber: Detik.com). selain itu penyimpangan siswa juga dapat terlihat dari data statistic dalam kasus ABH, kebanyakan anak telah masuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seperti terangkum dalam grafik berikut:



Sumber: (Kompas.com, 2019)

Adapun hasil riset dari KPAI di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengenai angka terjadinya tawuran. Jumlah tawuran pada tahun 2012 sudah mencapai 103 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 17 anak. Data terbaru tahun 2018, dilansir dari tempo.co (12/9/2018) KPAI menyebutkan bahwa kasus tawuran di Indonesia meningkat sebanyak 1,1 persen sepanjang 2018. Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Ustiyanti mengatakan pada tahun 2017, angka kasus tawuran hanya sebanyak 12,9 persen, tetapi meningkat menjadi 14 persen pada tahun 2018. Dengan maraknya kasus penyelewengan perilaku dan karakter anak bangsa, perlu ditumbuhkan kesadaran bagi tidak hanya tenaga pendidik dan pemerintah, melainkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk

menerapkan perilaku yang baik dan menanamkan karakter yang baik bagi anak Indonesia. Degradasi moral masih menjadi tantangan dunia pendidikan Indonesia saat ini. Meskipun pendidikan karakter telah ditanamkan di sekolah, tetapi pergaulan bebas, konsumsi minuman keras, narkoba, praktek aborsi, dan tawuran pelajar bahkan tiap tahun angkanya meningkat. (Hidayat dan Suryana, 2018)

Aktualisasi nilai dalam pembentukan karakter melalui pendidikan memerlukan perencanaan yang teliti dan matang agar proses dan hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Proses penanaman nilai dalam pembentukan karakter melalui pendidikan harus dikemas dengan baik dan terstruktur yang dapat diimplementasikan melalui proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kegiatan yang ditata kelola oleh manajemen sekolah dengan baik dan jelas.

Pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat daerah diwujudkan dalam bentuk program yang memadupadankan antara nilai kearifan lokal daerah dengan pendidikan karakter yang dirumuskan secara nasional. Hal ini agar terwujud generasi bangsa Indonesia yang tahap terhadap pengaruh globalisasi dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dengan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal yang ada.

Globalisasi dan perkembangan era yang begitu pesat telah menimbulkan distorsi yang luar biasa terhadap perilaku dan sikap masyarakat yang mulai kehilangan jati diri dan meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang sudah ada.

Hal tersebut juga yang menjadi kekhawatiran H. Dedi Mulyadi, SH selaku bupati Purwakarta periode 2013-2018. Melihat semakin menurunnya karakter generasi bangsa Indonesia seperti banyaknya kenakalan remaja, menurunnya degradasi moral, pengetahuan wawasan dunia yang minim, menurunnya rasa cinta tanah air dan bangga akan budaya yang dimilikinya, perilaku mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga perlunya pembinaan spiritual bagi peserta didik, dan rasa mencintai keluarga dengan membantu orangtua yang perlu dibiasakan sejak dini.

Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan daerah otonom untuk mengaturnya. Hal ini sesuai asas desentralisasi

daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Selain itu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi “Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama”

Oleh karena itu, pemerintah Purwakarta membuat sejumlah terobosan di bidang pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta. Terobosan itu tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Bab III Pasal 5 tentang nilai dasar pendidikan berkarakter. Terdapat “*7 Poe Atikan*” Pendidikan Purwakarta Istimewa sebagai bukti nyata secara yuridis dari bupati Purwakarta untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi peserta didik di Purwakarta. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, program “*7 Poe Atikan*” merupakan suatu pendekatan karakter yang menggunakan konsep tematik dari program harian yang telah disusun. Berikut ini adalah langkah yang dilakukan sekolah untuk menerapkan program “*7 Poe Atikan*”.

Hasil studi pendahuluan terhadap pelaksanaan “*7 Poe Atikan*” bersumber dari Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Bab III Pasal 5 tentang Nilai Dasar Pendidikan memuat enam konsep pengembangan karakter yang diselenggarakan di sekolah. Keenam konsep pengembangan tersebut ditampilkan pada gambar 1.1. di bawah ini.



Gambar 1.1 Program Pendidikan karakter Kab. Purwakarta
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Keenam konsep pendidikan karakter di atas memuat sejumlah nilai kearifan lokal yang ingin dikembangkan melalui proses pendidikan di sekolah. Kearifan memiliki ciri dan fungsi antara lain: 1) identitas suatu daerah, 2) sebagai pemersatu masyarakat, 3) sebagai warisan budaya yang diterima dan diaplikasikan, 4) sebagai kekayaan budaya suatu komunitas, 5) sebagai pola pikir dan karakter dalam berinteraksi sosial dengan mengutamakan kepentingan umum, 6) sebagai perekat kebersamaan dalam menjaga kelestarian identitas dari ancaman dan pengaruh dari luar (Utari, Degeng, dan Akbar, 2016).

Salah satu hasil penelitian berjudul *analisis implementasi program 7 poe atikan dalam mengembangkan pendidikan karakter pada siswa smp di kabupaten purwakarta* sebagai salah satu data empiris mengemukakan bahwa implementasi

pendidikan karakter berbasis 7 poe atikan di kab. Purwakarta merupakan 1) Kebijakan program sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter merupakan realisasi dari visi dan misi sekolah. 2) Proses pelaksanaan program 7 Poe Atikan berdasarkan pedoman Peraturan Bupati No 69 Tahun 2015 Bab III Pasal 5. Senin bertemakan Ajeg Nusantara, Selasa bertemakan Mapag Buana, Rabu bertemakan Maneuh di Sunda, Kamis bertemakan Nyanding Wawangi, Jumat bertemakan Nyucikeun Diri, Sabtu dan Minggu bertemakan Betah di Imah. 3) Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa sebagian siswa sudah memiliki tingkat kesadaran dalam pelaksanaan program 7 Poe Atikan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 4) Kendala yang dihadapi dalam menerapkan program 7 Poe Atikan adalah guru kebingungan dan ragu dalam mensinergikan materi pembelajaran pada makna program yang harus disampaikan kepada peserta didik. Sekolah harus mampu mengawasi setiap kegiatan peserta didik di rumah bersama orang tuanya 5) Upaya yang dilakukan yaitu evaluasi dengan konsisten, penyusunan silabus, program tahunan, program semester dan RPP yang disusun berlandaskan tujuan yang hendak dicapai. (Nurchahya, 2018)

Masyarakat di berbagai daerah memiliki cara yang unik dalam mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat. Mereka memiliki kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang sampai pada akhir menjadi budaya suatu daerah. Nilai-nilai kebijaksanaan masyarakat memahami alam dan sekitarnya serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan alam yang menjadi tempat tinggal atau rumah dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan nilai-nilai positif yang mengedepankan unsur-unsur keharmonisan dan keseimbangan.

Pendidikan karakter yang diterapkan di SMP Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk implementasi program “7 Poe Atikan” merupakan pendidikan karakter yang mengutamakan pelaksanaan jika dibandingkan dengan teori. Dalam pelaksanaannya, program “7 Poe Atikan” dilakukan dengan perencanaan dan metode yang diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah, maupun melalui berbagai program pembiasaan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Selain itu, dalam pelaksanaannya diperlukan peran berbagai pihak agar terwujudnya karakter

yang diharapkan oleh Kabupaten Purwakarta melalui dukungan manajemen mutu yang efektif.

Manajemen mutu menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bagi lembaga pendidikan. Mutu sebagai sebuah sistem adalah rangkaian yang saling terkait modern, yang memiliki ciri berorientasi pada pelanggan, adanya partisipasi aktif semua personil, adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab untuk kualitas.

Pandangan modern mengenai mutu, tidak hanya sebagai sebuah proses melainkan sebagai nilai yang melandasi tindakan-tindakan dalam menghasilkan *output*. Trilogi Juran (1988) merangkum tiga komponen dalam manajemen mutu, yakni: 1) perencanaan mutu; perencanaan kualitas melibatkan pengembangan produk, sistem, dan proses yang diperlukan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, 2) kontrol mutu; sebuah aktivitas dan proses yang melibatkan proses-proses, serta 3) peningkatan mutu; hwa peningkatan kualitas harus berkelanjutan.

Dalam menerapkan konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas selain harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta trust masyarakat terhadap sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus berperan sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat sekolah dan secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan mutu terpadu dengan menciptakan pendidikan karakter berbasis 7 poe atikan ini. Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan mutu, yaitu: (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus menekankan pada peningkatan mutu; yang ditentukan oleh pengguna jasa sekolah; (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan; (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan,

keterampilan, sikap arif bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional serta spiritual yang kokoh.

Sistem pendidikan karakter tersebut akan mendorong siswa dan personil sekolah untuk terus meningkatkan diri, sedangkan penghargaan akan memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri setiap personil sekolah, khususnya siswa. Jadi, sekolah harus mengontrol seluruh sumber daya termasuk sumber daya manusia yang ada, dan lebih lanjut harus menggunakan secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya juga sangat diperlukan untuk menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional. Adapun untuk mewujudkan pendidikan karakter berbasis 7 *po* atikan dengan mutu pendidikan yang terjamin, maka sekolah juga bisa menerapkan pola manajemen yang biasa diterapkan dalam industri yang bergerak di bidang barang atau jasa yaitu Total Quality Management (TQM). Manajemen Mutu Terpadu yang diterjemahkan dari Total Quality Management (TQM) atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait antara komponen pendidikan.

Implementasi manajemen mutu jika merujuk pada siklus yang disampaikan Deming (2013), setidaknya memuat lima langkah utama, yakni *plan, do, check, action*. Keempat langkah ini dapat digunakan oleh sekolah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan karakter yang efektif dan memenuhi unsur kualitas sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hasil studi literatur terhadap pelaksanaan pendidikan karakter sekolah masih dipersepsikan secara beragam dalam hal keberhasilannya. Belum ada kesamaan pandang terhadap model pendidikan, ukuran keberhasilan, model manajemen, serta sistem pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. Hal ini timbul karena cakupan karakter begitu luas, dan tidak merujuk pada satu atau dua karakter yang dikembangkan oleh sekolah. Ada sekolah yang mengembangkan karakter secara general (umum) yang menjadi bagian dari karakter yang dikembangkan dalam kerangka tujuan pendidikan nasional, ada juga sekolah yang

secara spesifik mengangkat kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai dasar pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini menjadi muara munculnya keragaman implementasi pendidikan karakter di sekolah.

Sekolah dalam mengembangkan karakter peserta didik tidak terbatas dengan cara mengintegrasikan pada sejumlah mata pelajaran dan disampaikan melalui kegiatan pembelajaran (Barus, 2015; Ibrahim, 2018; Kamaruddin et al., 2016; Maunah, 2015; Safitri, 2015; Winarni, 2013), tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler (Agustina & Tobari, 2017; Maunah, 2015; Syarief, 2017), budaya sekolah (Bahri, 2015; Maunah, 2015; Safitri, 2015) atau melalui internalisasi nilai positif yang di tanamkan oleh semua warga sekolah, pembiasaan dan latihan, pemberian contoh dan teladan, penciptaan suasana berkarakter di sekolah (Dalimunthe, 2015).

Sejumlah hasil penelitian lebih banyak mengkaji pada implementasi pendidikan karakter di sekolah dan kaitanya dengan karakter yang dikembangkan, seperti pembentuk kecerdasan moral (Setiawan, 2013), sikap disiplin siswa (Susiyanto, 2014), budi pekerti (Pristine & Suryani, 2015), kepribadian holistik (Maunah, 2015), perilaku sosial dan keagamaan (Fauzi & Mujibudda'wah, 2016; Muadzin, 2018), kemandirian (Wuryandani et al., 2016), mengurangi sikap primordialisme (Agustina & Tobari, 2017), serta semangat kebangsaan dan cinta tanah air (Priyambodo, 2017).

Penelitian tentang manajemen pendidikan karakter di SMP dilakukan oleh Buchory & Swadayani (2014) meliputi penerapan fungsi: 1) perencanaan, yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua guru; 2) pengorganisasian, yang dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua guru; 3) pelaksanaan, adanya dukungan penuh oleh semua komponen sekolah, baik kepala sekolah dan wakilnya, semua guru, orang tua, pengawas sekolah, maupun siswa, serta (4) pengawasan, adanya penyerahan tanggung jawabnya kepada wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan urusan kesiswaan, pembina OSIS, STP2K, dan guru bimbingan konseling.

Dari hasil studi literatur tersebut, maka perlu adanya studi yang mengkaji secara spesifik manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah agar terjadi keselarasan hasil dengan tujuan yang ditetapkan.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Hasil studi pendahuluan diperoleh sejumlah informasi terhadap pelaksanaan program “7 Poe Atikan” sebagai program pendidikan karakter di Kabupaten Purwakarta yang belum berjalan secara efektif. Indikasi masalah yang muncul dan menjadi penyebab hal ini terjadi adalah belum dipahami sepenuhnya program “7 Poe Atikan” oleh pihak sekolah dalam hal tujuan program, indikator capaian program, dan muatan materi yang harus diberikan kepada peserta didik pada program tersebut. Indikasi selanjutnya adalah berkenaan dengan manajemen mutu terhadap pelaksanaan program “7 Poe Atikan” tersebut. Manajemen mutu di tingkat sekolah dalam pelaksanaan program “7 Poe Atikan” belum berjalan secara efektif mengingat mekanisme penjaminan mutu, prosedur mutu, kebijakan mutu, dan dokumen mutu yang dibutuhkan belum dipahami sepenuhnya. Disamping itu, ketersediaan SDM pelaksanaan manajemen mutu juga terbatas secara kompetensi dan kuantitas. Ilustrasi hasil identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Sumber: Visualisasi oleh Peneliti

Atas dasar di atas maka, fokus penelitian ini mengkaji pada bagaimana manajemen mutu terhadap pelaksanaan program “7 Poe Atikan” sebagai bentuk pengembangan karakter siswa SMP di Kabupaten Purwakarta. Secara khusus pertanyaan penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Apa yang menjadi landasan yuridis dan filosofis program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta?
 - b. Seperti apa visi, misi dan tujuan program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta?
 - c. Apa saja nilai/bentuk karakter yang dikembangkan dalam program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta?
 - d. Bagaimana implementasi program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta?

- e. Apa yang menjadi kendala dan pendukung pelaksanaan program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimanakah perencanaan manajemen mutu program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Bagaimanakah profil pelaksana program “7 *Poe Atikan*”?
 - b. Bagaimanakah desain kurikulum program “7 *Poe Atikan*”?
 - c. Bagaimanakah profil karakter hasil pelaksanaan program “7 *Poe Atikan*” pada siswa SMP di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen mutu dalam program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan manajemen mutu program “7 *Poe Atikan*”?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen mutu program “7 *Poe Atikan*”?
 - c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program “7 *Poe Atikan*”?
4. Bagaimanakah monitoring / evaluasi program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan dalam mengukur pencapaian program “7 *Poe Atikan*”?
 - b. Seperti apa strategi pengawasan program “7 *Poe Atikan*”?
 - c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan program “7 *Poe Atikan*”?
5. Bagaimanakah tindak lanjut program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Seperti apa tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program “7 *Poe Atikan*”?
 - b. Apa sajakah dampak dari hasil evaluasi program “7 *Poe Atikan*”?
 - c. Apakah sekolah Membuat rekomendasi terhadap ketercapaian organisasi?

- d. Apakah sekolah menentukan tindakan yang tepat dalam pelaksanaan manajemen selanjutnya? Bagaimanakah prosesnya?
6. Bagaimana gambaran model manajemen mutu implementasi pendidikan karakter berbasis “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Bagaimana rasionalisasi model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - b. Bagaimana asumsi model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - c. Bagaimana tujuan model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - d. Bagaimana visualisasi model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - e. Apa saja yang menjadi komponen model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - f. Seperti apa indikator keberhasilan model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?
 - g. Apa saja yang menjadi prasyarat dalam implementasi model manajemen mutu dalam implementasi pendidikan karakter “7 *Poe Atikan*”?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai manajemen mutu terhadap pelaksanaan program “7 *Poe Atikan*” pada siswa SMP di Kabupaten Purwakarta dalam upaya pencapaian sekolah bermutu secara optimal. Adapun tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta;
2. Melakukan analisa terhadap proses perencanaan manajemen mutu program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta;
3. Melakukan analisa terhadap pelaksanaan manajemen mutu dalam program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta;
4. Melakukan analisa terhadap proses monitoring/ evaluasi program “7 *Poe Atikan*” SMP di Kabupaten Purwakarta;

5. Melakukan analisa terhadap proses tindak lanjut program “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta, serta
6. Merumuskan model manajemen mutu implementasi pendidikan karakter berbasis “7 Poe Atikan” SMP di Kabupaten Purwakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka penulis meyakini bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat secara teoritik dan praktis :

1. Manfaat dari Aspek Teori

Hasil penelitian tentang tata kelola sekolah berdasarkan kearifan lokal di Ka. Purwakarta ini diharapkan dapat memperkuat ilmu Administrasi Pendidikan khususnya mengenai konsep tata kelola terkait penyelenggaraan suatu program di lembaga pendidikan yang melibatkan berbagai unsur internal maupun eksternal yang terintegrasi. Program disini merupakan program pengembangan tata kelola yang akan menunjang pembentukan karakter peserta didik.

2. Manfaat dari Aspek Kebijakan

Manfaat penelitian akan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pada pasal 36 disebutkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan di sekolah berdasarkan pada kurikulum pendidikan harus memperhatikan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat serta pada pasal 45 bahwa setiap satuan pendidikan

Manfaat penelitian akan mendukung implementasi peraturan Bupati Kab. Purwakarta No. 69/2015 tentang Pendidikan Berkarakter untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya,

mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Berdasarkan pernyataan tersebut sudah selayaknya Peserta Didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (life skill) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Selain itu guna mendukung UU No. 20 tahun 2003 terutama pasal 10 yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada peneliti dalam hal :

- 1) Mengembangkan konsep berpikir secara sistematis melalui tahapan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang dikembangkan.
- 2) Pengalaman dalam membina hubungan saling percaya antara peneliti dengan Nara Sumber dalam penelitian.
- 3) Pengalaman Eksplorasi teori dan konsep yang mendukung menjadi suatu konsep baru atau hipotesis berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan.
- 4) Peningkatan wawasan, pengetahuan serta aplikasi konsep/teori dalam lingkup ilmu administrasi pendidikan khususnya dalam tata kelola sekolah.

b. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah)

Hasil penelitian akan memberikan manfaat kepada Tim Pengembang Kurikulum dalam pemantauan dan pengendalian serta pengembangan tata kelola sekolah. Tim pengembang kurikulum akan mendapatkan informasi yang cepat serta akurat dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

c. Bagi Pemerintah Kab. Purwakarta

Hasil penelitian akan memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan Kebijakan Khususnya dalam Dinas Pendidikan terkait Manajemen Mutu Sekolah Berdasarkan Program “7 *Poe Atikan*” Dalam Mengembangkan Pendidikan karakter Pada Siswa SMP di Kabupaten Purwakarta.

4. Manfaat dari segi Aksi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya terkait tata kelola sekolah berbasis kearifan lokal, serta bagaimana implementasi dan dampak yang ditimbulkan dari Manajemen Mutu Sekolah Berdasarkan Program “7 *Poe Atikan*” Dalam Mengembangkan Pendidikan karakter Pada Siswa SMP di Kabupaten Purwakarta.

1.5. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur Organisasi Disertasi terdiri dari BAB I Pendahuluan, Pada bagian di bawah ini disampaikan struktur bab pendahuluan yang diadaptasi dari Evans, Gruba dan Zobel (2014) dan juga Paltridge dan Starfield (2007) yang terdiri dari : Latar belakang penelitian, Rumusan masalah penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat/signifikansi penelitian dan Struktur organisasi disertasi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan the state of the art dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Bab ini terdiri dari: (1) konsep, teori, dalil, hukum, model, dan rumusan serta turunannya yang relevan dengan bidang kajian penelitian; (2) hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang kajian penelitian; (3) posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan. Karna peneliti menggunakan metode Kualitatif maka metode penelitian terdiri dari : (1) Desain penelitian; (2) Partisipan dan tempat penelitian ; (3) Pengumpulan data; (4) Analisis data; (5) Isu etik.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.